

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk sangat padat. Jumlah penduduk ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tingginya angka penduduk belum juga sejalan dengan angkatan kerja yang bekerja. Menurut data Badan Pusat Statistika (2020), pada tahun 2020 penduduk usia kerja sebanyak 199,38 juta orang dengan angkatan kerja sebanyak 137,91 juta orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 61,47 juta orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, angkatan kerja yang bekerja sebanyak 131,03 juta orang dan pengangguran sebanyak 6,88 juta orang.

Pengangguran masih menjadi masalah yang saat ini belum kunjung selesai. Pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Selain itu faktor lain yang menjadi masalah munculnya pengangguran adalah skill atau kemampuan pencari kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Masalah pengangguran di Kabupaten Ponorogo juga masih menjadi problematika yang mendapat perhatian lebih karena masih banyaknya jumlah pengangguran yang ada. Menurut data Badan Pusat Statistika (2020), jumlah pengangguran di Kabupaten Ponorogo pada

tahun 2019 sebesar 17,992 orang sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dengan jumlah pengangguran sebesar 22,869 orang.

Dengan adanya keterbatasan kesempatan kerja yang ada didalam negeri membuat masyarakat lebih cenderung memilih untuk bekerja di luar negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (2019), pengangguran di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 didominasi oleh tingkat pendidikan, lulusan SMA dan SMK menjadi penyumbang angka tertinggi dibandingkan lulusan lainnya dengan jumlah 6.782 orang. Pada tahun 2020, proporsi terbesar pengangguran terbuka berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas dan sederajat sebesar 8.576 orang (BPS, 2021). Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat lebih memiliki keinginan bekerja di luar negeri dengan harapan mereka akan mendapatkan gaji yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu Kabupaten penyumbang TKI terbanyak ketiga di Jawa Timur. Pada tahun 2020, jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri yang berasal dari Kabupaten Ponorogo sebesar 36.216 pekerja (Disnaker, 2020).

Dari beberapa faktor tersebut, alasan lain sebelum masyarakat memilih untuk bekerja di luar negeri dikarenakan pendapatan yang dihasilkan belum mencukupi kebutuhan hidup sehingga menyebabkan pendidikan anak mereka rendah dan sulit mendapatkan layanan kesehatan karena terkendala oleh mahalnya biaya. Namun, setelah mereka berhasil atau memiliki gaji yang tinggi, seringkali salah memanfaatkan penghasilan yang didapat. Mereka lebih cenderung memanfaatkan untuk pola konsumtif. Biasanya

digunakan untuk membangun rumah, membeli mobil, membeli motor, dan sebagainya. Ironisnya, ketika mereka sudah kembali ke rumah masing-masing mereka tidak memiliki pekerjaan, bahkan menjadi pengangguran dan hanya mengandalkan gaji yang didapat selama bekerja.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan adanya Program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah program untuk penanganan desa yang didominasi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna beserta anggota keluarganya yang pelaksanaannya terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan. Program tersebut merupakan program yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengurangi dan melindungi TKI. Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup program Desmigratif meliputi a) pembangunan pusat layanan migrasi, b) penumbuhkembangan usaha produktif, c) fasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga, d) fasilitasi penumbuhkembangan koperasi, usaha mikro dan kecil (Kemnaker, 2017).

Program Desmigratif di Kabupaten Ponorogo salah satunya berada di Kecamatan Jenangan tepatnya Desa Paringan. Kecamatan Jenangan menempati posisi TKI terbanyak ketiga di Ponorogo dengan jumlah TKI pada tahun 2017 sebesar 427 pekerja dan tahun 2018 sebesar 446 pekerja. Desa Paringan menjadi desa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai TKI, dimana hampir 60% dari penduduknya yang berjumlah 6,088 orang memiliki keluarga sebagai TKI. Oleh karena itu, desa Paringan

ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai desa penerima program Desmigratif. Selain itu, desa Paringan juga terkenal dengan sebutan kampung gila. Berdasarkan survei oleh Rumah Sakit Jiwa Malang dan Pemerintah Daerah Ponorogo (Widayat, 2018) jumlah penderita gangguan jiwa di Desa Paringan pada tahun 2011 sebanyak 60 orang. Jumlah ini tergolong besar mengingat jumlah penduduk desa yang mencapai 6000 jiwa sehingga jumlah perbandingan antara warga yang mengalami gangguan jiwa dengan warga yang sehat adalah 1:100. Dalam pelaksanaannya, program Desmigratif memiliki empat pilar, yaitu pelayanan migrasi terhadap calon TKI, usaha produktif bagi TKI Purna, *community parenting* untuk keluarga TKI, dan koperasi usaha. Dari adanya program tersebut diharapkan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan prosedur dan juga mendapatkan perlindungan terhadap keluarga TKI atau pun TKI purna. Salah satu bentuk programnya adalah Kelompok Usaha Tenaga Kerja Mandiri dimana sasarannya adalah TKI Purna agar mereka yang tidak kembali ke luar negeri dapat melakukan usaha produktif dan mengurangi angka Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

TKI Purna merupakan tenaga kerja Indonesia yang tidak sedang bekerja diluar negeri dan tidak akan kembali ke luar negeri atau tenaga kerja yang masa kontraknya telah habis. Kelompok Usaha Tenaga Kerja Mandiri “Dewi Songgolangit” merupakan pemberdayaan TKI Purna yang ada di Desa Paringan. Kelompok usaha tersebut dibentuk atas program dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kelompok usaha ini terbagi menjadi dua kelompok dengan jenis usaha berbeda, yaitu kelompok usaha industri

makanan ringan dan kelompok usaha olahan ketela. Adanya kelompok usaha ini TKI Purna dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dan memanfaatkan pendapatan selama bekerja diluar negeri untuk memulai berwirausaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam proses pemberdayaannya, perlu didukung dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia nya terutama bagi wirausaha pemula atau yang belum sama sekali memulai usaha.

Kegiatan pada kelompok usaha ini dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari pemberian pelatihan usaha, pendampingan, dan bantuan modal. Pelatihan yang diadakan dimulai dengan diberikannya materi dan selanjutnya diberikan praktek secara langsung mulai dari awal hingga akhir sehingga para peserta dapat menerapkannya. Secara berkelanjutan, para peserta juga akan diberikan bimbingan dan konsultasi melalui pendampingan secara rutin. Selain itu, dengan bantuan modal yang diberikan diharapkan dapat mendukung usaha yang akan dijalankan. Dari hasil penelitian Fathurrohman (2016), pelatihan usaha mampu mempengaruhi kesejahteraan mustahiq Dompot Dhuafa Yogyakarta sehingga pelatihan mampu meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta pelatihan dan berdampak pada meningkatnya taraf kesejahteraan keluarga mereka. Penelitian dari Wahyudhi (2018), memberikan hasil bahwa pendampingan mempengaruhi kesejahteraan keluarga muslim program KUBE PKH. Pendampingan tidak hanya berperan sebagai verifikator dan pekerja sosial, tetapi juga motivator kelompok agar anggota kelompok dapat menjadi keluarga yang mandiri secara ekonomi, punya kesadaran kritis sebagai warga dan menjadi bagian

dari masyarakat secara inklusif. Namun, penelitian dari Nurudin (2011) memberikan hasil bahwa pendampingan tidak mempengaruhi peningkatan pendapatan mustahiq. Penelitian dari Wahyudhi (2018) juga memberikan hasil bahwa pemberian modal usaha mempengaruhi kesejahteraan keluarga muslim program KUBE PKH. Dengan adanya pemberian modal usaha yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan pendapatan keluarga melalui modal usaha tersebut.

Namun, adanya pelatihan usaha, pendampingan, dan bantuan modal pada Kelompok Usaha TKM Desa Paringan belum diketahui bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan keluarga TKI Purna. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pelatihan Usaha, Pendampingan, Dan Bantuan Modal Terhadap Kesejahteraan Keluarga TKI Purna (Studi Pada Kelompok Usaha Tenaga Kerja Mandiri Desa Paringan)”**.

B. Perumusan Masalah

Adanya kelompok usaha tenaga kerja mandiri di desa Paringan mampu memberikan keterampilan bagi para TKI Purna sehingga dapat melakukan usaha produktif dan tidak kembali lagi ke luar negeri. Namun, belum diketahui bagaimana pengaruh kelompok usaha tenaga kerja mandiri terhadap kesejahteraan keluarga TKI Purna. Sehingga dari permasalahan yang dikemukakan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pelatihan usaha terhadap kesejahteraan keluarga TKI purna?

2. Bagaimana pengaruh pendampingan terhadap kesejahteraan keluarga TKI purna?
3. Bagaimana pengaruh bantuan modal terhadap kesejahteraan keluarga TKI purna?
4. Bagaimana pengaruh pelatihan usaha, pendampingan, dan bantuan modal terhadap kesejahteraan keluarga TKI purna?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan usaha terhadap kesejahteraan keluarga TKI purna
- b. Untuk mengetahui pengaruh pendampingan terhadap kesejahteraan keluarga TKI purna
- c. Untuk mengetahui pengaruh bantuan modal terhadap kesejahteraan keluarga TKI purna
- d. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan usaha, pendampingan dan bantuan modal terhadap kesejahteraan keluarga TKI purna

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan teori terhadap program usaha produktif yang terdapat pada Program Desmigratif (Desa Migran Produktif).
 - b. Untuk memberikan informasi tentang pelatihan usaha, pendampingan dan modal usaha pada program kelompok usaha

tenaga kerja mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan TKI Purna.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kelompok Usaha Tenaga Kerja Mandiri, untuk dapat dijadikan sebagai sumber informasi, saran dan kritik untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan program usaha produktif.
- b. Bagi peneliti lain, sebagai acuan atau tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang serupa.
- c. Bagi pemerintah desa, sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mengelola kelompok usaha kedepannya serta menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah.

